

# IDEOLOGI POLITIK DILEMATIS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) ANTARA GERAKAN TARBIYAH DAN PRAGMATISME

**Ach. Basyir**

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

**Abstrak:** *Kebidupan partai politik di Indonesia hanya cenderung mengedepankan kepentingan politik praktis semata dan mengenyampingkan pada nilai ideologi. Fenomena ini mulai terlihat jelas pada pemilu 2014 ketika partai-partai politik membuang jauh-jauh persaingan antar partai demi merebut kekuasaan. Partai-partai Islam dan sekuler yang sebelumnya menjadi lawan, kemudian bergabung menjadi kawan. Berbagai partai-partai politik yang awalnya merupakan partai yang memiliki basis ideologi dan beridentitas sebagai partai kader malah bergeser menjadi partai yang pragmatis. Bahkan, kasus koalisi dengan jarak ideologi yang berbeda seperti PDIP sebagai partai nasionalis menjalin koalisi dengan partai PPP dan PKS yang mana kedua partai tersebut menjadikan Islam sebagai basis ideologinya. Selain itu, di beberapa daerah terjadi koalisi yang secara akal sehat sangat bersebrangan antara PKS dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang secara formal PDS merupakan partai umat nasrani. Oleh karena itu, penulis menganggap penting meneliti hal ini lebih lanjut. Penelitian ini menemukan bahwa, partai politik yang memiliki latar belakang ideologi Islam seperti PKS lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis daripada nilai ideologi yang dimilikinya. Sehingga dimana partai tersebut yang pada awalnya berbasis religius (islam) dan merupakan partai doktriner, kini berbalik arah semakin mendekati diri dan terbuka pada partai yang berideologi sekuler ataupun nasionalis. Hal itu dilakukan demi kepentingan pragmatis dan upaya mendapatkan meja kekuasaan.*

**Kata Kunci:** Ideologi Politik, PKS, Pragmatisme

## A. Pendahuluan

Pada masa awal reformasi, politik kepartaian di Indonesia memperlihatkan satu fenomena yang tampak bertolak belakang. Kondisi ini dapat dilihat menjelang pemilu tahun 1999, dimana partai-partai politik diberikan kebebasan untuk menegaskan warna ideologinya. Namun, sejak pemilu 2004 dan sepanjang pelaksanaan pemilukada 2005-2009, posisi ideologi politik sebuah parpol seakan berkurang maknanya. Para elit politis, dengan mengenyampingkan ideologi partainya masing-masing, hanya duduk bersama menyatukan persepsi dengan waktu yang relatif singkat.

Sistem pemilu yang diselenggarakan sejak era reformasi telah melahirkan puluhan partai politik yang memenuhi persyaratan *electoral threshold*. Banyaknya jumlah partai tersebut, disamping merupakan sinyal positif atas keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun karakter nasional bangsa melalui perjuangan politik partai, ternyata juga membawa berbagai masalah yang tidak diharapkan. Salah satu persoalan serius yang muncul adalah semakin kaburnya batas ideologi antar partai, dikarenakan baik partai kiri maupun kanan semakin bergeser ke tengah, dan juga terjadi pergeseran ideologi seiring dengan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia.<sup>1</sup>

Pembentukan nilai ideologi partai politik sangat lemah dalam praktik politik keseharian. Partai lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis dari pada nilai ideologis. Implikasinya, koalisi yang terbentuk lebih berbasis pada isu pragmatis partai politik dan melupakan ideologi formal yang dimiliki. Fenomena yang terdapat di Indonesia saat ini adalah berlomba-lombanya partai-partai politik untuk menginklusifkan diri dan mewadahi semua basis pemilih, sedangkan ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai, dan ideologi partai tidak menjadi tolak ukur lagi dalam menyusun suatu kebijakan. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik diteliti, dimana partai yang berbasis religius (islam) yang merupakan partai doktriner saat ini semakin mendekati diri dan terbuka pada partai yang berideologi sekuler ataupun nasionalis sehingga menjadi partai yang pragmatis. Keterbukaan terhadap partai yang memiliki

---

<sup>1</sup>“Urgensi Perbedaan Ideologi Dalam Partai Politik”, (<http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/16/urgensi-perbedaan-ideologi-dalam-partai-politik/>). Akses 28 September 2013.

platform berbeda menandakan bahwa jarak ideologi di antara partai-partai politik saat ini semakin menyatu tak ada penyekat di antara partai-partai yang memiliki ideologi partai yang berbeda. Fenomena ini disebut oleh Giovanni Sartori.

Sebagai kecenderungan sentripetal dalam partai politik. Menurut Sartori, dalam demokrasi yang sudah terinstitusionalisasi secara baik, ideologi partai akan mengarah ke tengah dan membuat penyekat ideologi antar partai akan semakin tidak jelas. Dengan kata lain, partai-partai politik akan semakin pragmatis dalam upayanya mendapatkan kekuasaan.<sup>2</sup> Fenomena ini mulai terlihat jelas pada pemilu tahun 2004. Berbagai partai politik dengan variasi ideologinya bersaing keras dalam pemilu legislatif dan presiden. Ketika pemilu berakhir, tampak jelas partai-partai politik itu membuang jauh-jauh persaingan yang telah berlangsung, seolah mereka mengabaikan sama sekali hasil-hasil pemilu dan bersatu dalam membentuk pemerintahan inklusif yang melibatkan semua pihak. Hal ini dapat dilihat pada Kabinet Indonesia Bersatu yang dibentuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono yang berhasil memenangkan pilpres pada saat itu.<sup>3</sup>

Dalam kabinet tersebut terdapat partai-partai Islam yang merupakan lawan sebelumnya kemudian bergabung dengan partai-partai sekuler menjadi kawan. Partai politik yang awalnya merupakan partai yang memiliki basis ideologi sebagai partai doktriner yang beridentitas sebagai partai kader mulai bergeser menjadi partai yang pragmatis dan menunjukkan jati diri sebagai partai massa. Jelas bahwa partai-partai di Indonesia semakin bergerak ke tengah dalam spektrum ideologi. Relasi ideologi partai yang satu dengan yang lainnya tidak seperti pada masa orde lama, di mana jarak ideologi partai pada saat itu disebut Sartori dalam klasifikasi sistem kepartaian pluralisme ekstrem saat ini telah berubah ke sistem kepartaian yang cenderung lebih moderat, dan juga pergeseran ideologi partai. Contoh kasus koalisi dengan jarak ideologi yang berjauhan terjadi dalam Pilkada Kota Yogyakarta, PDIP sebagai partai nasionalis menjalin koalisi dengan PPP dan PKS yang menjadikan Islam sebagai ideologi formal partai. Bahkan di beberapa daerah, partai Islam seperti PKS juga menjalin koalisi dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang

---

<sup>2</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.128

<sup>3</sup>Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati "Dari dilema ke Kompromi"*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 34.

secara formal adalah partai umat Nasrani. Demikian juga di tingkat nasional, pada pilpres 2004 putaran kedua, PPP juga menjalin koalisi dengan PDIP dalam mencalonkan Megawati Soekarnoputri.

Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi ideologi partai politik sangat lemah dan koalisi yang dibangun parpol lebih dominan sebagai ikatan koalisi pragmatis. Fenomena yang terjadi di tatanan kehidupan partai politik Indonesia tersebut, bukan saja membuat rakyat kesulitan melihat perbedaan kontinum partai kiri-kanan, namun yang lebih esensial adalah semakin jauh jarak partai itu sendiri dari basis historis pendiriannya dan juga perlu dipertanyakan lagi akan konsistensi ideologi partai yang telah menjadi nafas perjuangan partai. Wilayah keyakinan atas nilai-nilai yang akan diperjuangkan melalui suatu sistem kekuasaan menjadi semakin sempit, tidak variatif, dan mereduksi peluang kompetisi pencarian alternatif-ideologis. Kepercayaan masyarakat kepada partai-partai yang membawa ideologi sebagai asas perjuangan partainya, misalnya saja partai berbasis Islam semakin berkurang. Hal ini menyebabkan semakin kecilnya perolehan jumlah suara yang didapatkan sebagian besar partai-partai Islam selama pemilu beberapa tahun belakangan.

Belajar dari perjalanan sistem kepartaian di Indonesia hingga hari ini, salah satu partai politik Islam yang memperoleh suara paling besar di antara partai politik Islam lainnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulaimembaca situasi politik kepartaian yang terjadi di Indonesia. Kemunculan atau lahirnya Partai Keadilan Sejahtera memberikan makna tersendiri bagi berdirinya kembali partai Islam di Indonesia yang menandakan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam masih memberikan kepercayaan yang besar pada partai islam. Selanjutnya akan dibahas lebih jauh awal terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera yang dulunya bernama Partai Keadilan.

Berdirinya Partai Keadilan (PK) bisa dikatakan berbeda dengan partai lainnya baik partai yang berbasis ideologis maupun yang non ideologis. Kelahiran Partai Keadilan berangkat dari musyawarah yang cukup panjang, yang membahas tentang penyikapan terhadap era reformasi yang membuka keran kebebasan untuk berekspresi diantaranya mendirikan partai politik. Persoalan mendirikan partai adalah agenda yang hangat dibicarakan kalangan tarbiyah, sebagian mengatakan perlu mendirikan partai politik dan sebagian menyatakan tidak perlu. Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera tidak bisa lepas dari peranan Partai Keadilan.

Pada pemilu 1999 Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu. Hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang.<sup>4</sup>

Kegagalan ini menyebabkan Partai Keadilan (PK) bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Beberapa pengamat menilai bahwa salah satu faktor kekalahan partai Islam pada pemilu 1999 adalah parpol Islam belum menampilkan inklusivitasnya. Indikasi ini diperkuat oleh kritikan Van Zorge, yang menilai Partai Keadilan sebagai modernis-eksklusif (*modernist-exclusivist*). Kecendrungan terlalu besar ke arah eksklusif akan menyulitkan partai ini untuk maju, dan bahayanya bagi PK akan potensial untuk 'layak dimusuhi' oleh kawan-kawan penganut Islam Kultural. Celakanya, justru eksklusifisme adalah lawan paling potensial bagi cita-cita membangun watak bangsa. Watak bangsa tidak mungkin dibangun paralel dengan eksklusifisme. Dibalik kritikan itu Van Zorge juga memberikan penilaian "inklusif". PK yang diakuinya sebagai partai *reformist* dan *unique* itu, disebut-sebut sebagai partai yang gampang berkompromi dan bekerja sama ketika berhadapan dengan realitas politik. "*Partai Keadilan has demonstrated a willingness in the past to compromise and work within the confines of political realities,*" ujar Van Zorge.<sup>5</sup>

Selama ada pemilu yang "luber", partai-partai inklusif dirangsang terus untuk menambah jumlah pengikutnya dengan cara memasukan golongan baru, sehingga menjadi lebih inklusif lagi.<sup>6</sup> Sikap inklusif ini dijawab oleh PKS dengan melakukan rekrutmen anggota dari orang-orang yang berlatar belakang non-tarbiyah. Bahkan pada pemilu 2004, partai PKS menjaring lebih dari 30 calon legislatif non muslim. Disamping itu, PK juga merekrut orang-orang non muslim sebagai anggotanya. Hal ini terlihat dari di sahkanya DPD Partai Keadilan Piniiai pada tanggal 5 Juni 2002, yang mayoritas pengurusnya beragama kristen. Para pimpinan PKS juga memberikan kesempatan kepada tokoh agama Hindu untuk menjadi anggota legislatif. Kesempatan mengemuka pada mukernas di Bali pada 1-

---

<sup>4</sup>Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, ed., *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi Dan Program 2004-2009* (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 230.

<sup>5</sup>R. William Liddle, *Partisipasi Dan Partai Politik*. Penerjemah Tim Pustaka Utama Grafiti (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 14.

<sup>6</sup>Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2007.), hlm. 112.

3 Februari 2008, ketika itu Fahri Hamzah menawari Ida Pedanda Sebali Tianyar seorang tokoh Hindu Bali untuk menjadi caleg dari partainya.<sup>7</sup>

Dalam perspektif ini, perlu ditelaah lebih lanjut, *pertama*, PKS adalah partai baru yang berbeda dari partai politik kebanyakan; *kedua*, PKS berasal dari komunitas muslim baru di Indonesia yang dalam perkembangan kepartaian saat ini ada kesan ideologi yang diusungnya semakin bergerak ke tengah. PKS memilih untuk menjadi partai politik yang terbuka atau bisa dimaknai bahwa Partai Keadilan Sejahtera saat ini memilih menjadi partai yang plural, menerima perbedaan dan keberagaman. Tentunya ini bersebrangan dengan visi umum dan visi khusus Partai Keadilan Sejahtera yang secara resmi menyatakan akan mengarahkan partai dakwah itu untuk memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; akan mengarahkannya menjadi kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang; akan mengarahkannya sebagai kekuatan yang menggalang dan memelopori kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *Rahmatan lil-Alamin*; akan mengarahkannya sebagai akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.<sup>8</sup>

Menjadi sebuah keharusan dan penegasan bahwa garis ideologi suatu partai seharusnya menjadi panduan partai tersebut menjawab berbagai persoalan yang ada, dan setiap kebijakan partai dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Penyimpangan kebijakan dari garis ideologinya tentu akan mengakibatkan masalah internal bahkan dapat membuat ketidakpercayaan pengikutnya. Konsistensi menjadi sangat berarti dalam menjalankan kebijakan partai selaras dengan garis ideologi yang menjadi asas perjuangan dari Partai Keadilan Sejahtera. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Ideologi Dilematis Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”.

---

<sup>7</sup>Cahyadi Takariawan, *Bukan Di Negeri Dongeng Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan*, (Jakarta: Syaamil, 2003), hlm. 124-126.

<sup>8</sup>Partai Keadilan Sejahtera, Platform Kebijakan Pembangunan Falsafah Dasar Perjuangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Jakarta: 2008.

## B. Partai Keadilan Sejahtera

### 1. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera

Dalam buku Ideologi Politik PKS “Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen”<sup>9</sup> disebutkan bahwa bibit-bibit PK muncul sekitar tahun 1970-an. Pada masa itu, bibit-bibit PK adalah para aktivis dakwah kampus. Para aktivis dakwah kampus tersebut mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Lembaga ini kerap menyelenggarakan berbagai aktivitas keagamaan, seperti pengajian untuk mahasiswa. Aktivitas keagamaan lembaga tersebut, lebih bersifat rahasia atau lebih sering dilakukan secara diam-diam dan jika lembaga tersebut menyelenggarakan pengajian untuk banyak orang, mereka berkamuflase dengan mengatasnamakan kegiatan mahasiswa.

Hal ini sengaja mereka lakukan karena pada masa itu, rezim yang berkuasa adalah rezim Soeharto. Rezim ini dikenal sangat represif terhadap gerakan keagamaan. Akan tetapi, situasi tersebut mulai berubah pada era 1990-an, saat Soeharto mulai menempatkan para aktivis Islam sebagai sekutu. Sejak saat itulah, gerakan yang semula bernama *Usroh* ini berganti nama menjadi *Ikhwan* dan mereka menamai aktivitas mereka dengan sebutan *Tarbiyah*.

Secara garis besar, gerakan ini terdiri dari lima elemen penting, yaitu pertama, DDII (Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia) dengan tokoh utamanya Mohammad Natsir. Kedua, aktivis LDK dan Rohis. Ketiga, alumnus perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Timur Tengah. Keempat, aktivis ormas Islam. Kelima, dai lulusan pesantren. Lima elemen tersebut bergerak bersama-sama, saling mendukung, dan saling menguatkan dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Dari lima elemen tersebut, elemen yang paling berperan besar bagi lahirnya gerakan ini adalah DDII. Para aktivis DDII yang merupakan mantan aktivis Partai Masyumi yang dibubarkan pada awal masa pemerintahan Soeharto ini, menjadi inisiator awal berdakwah melalui kampus dan sekaligus peletak dasar-dasar strategi dakwah kampus. Selanjutnya, lahirlah LDK yang kemudian banyak bergerilya di dalam kampus. Kehadiran LDK tersebut terbukti telah menyumbangkan berbagai kemajuan umat Islam, misalnya lembaga ini bekerjasama dengan

---

<sup>9</sup>M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008).

DDII banyak mengusahakan pembangunan masjid di sekitar kampus guna dipakai untuk berbagai aktivitas dakwah. Selanjutnya, gerakan Tarbiyah membangun banyak lembaga, seperti lembaga pendidikan Nurul Fikri, lembaga dakwah Khoiru Ummah, kelompok kesenian nasyid, dan majalah *Sabili*. Selain itu, gerakan Tarbiyah juga menyebarkan berbagai gagasan dan pemikiran mereka melalui buku-buku yang diterbitkan antara lain oleh penerbit Gema Insani Press (GIP), Pustaka Al-Kautsar, Era Intermedia, dan Asy-Syamiil.

Pada pertengahan tahun 1998, rezim Orde Baru pimpinan Soeharto tumbang. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para aktivis Tarbiyah. Setelah berdiskusi cukup alot dan dalam waktu yang cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk berdakwah dan berjuang lewat jalur politik. Akhirnya, pada agustus 1998, para aktivis Tarbiyah mendirikan Partai Keadilan (PK), sebuah parpol yang berasaskan Islam. Selang setahun pasca didirikan, parpol ini berhasil mengikuti pemilu dan mampu menjaring 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan jumlah suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR. Pada Pemilu 2004, parpol yang semula bernama PK kemudian berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada tahun 2002 ini, mampu meningkatkan jumlah suara secara signifikan. Pada Pemilu 2004 tersebut, PKS meraih 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% dari total suara dan berhasil mendudukkan 45 wakilnya di DPR. Bahkan mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, berhasil menduduki jabatan Ketua MPR.

Dalam kancah politik, PKS memiliki peran yang signifikan bila dibandingkan dengan parpol baru lainnya. Salah satu hal yang cukup bergema adalah isu-isu parlemen bersih dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Selain itu, PKS juga kerap menyuarakan isu-isu moral. M. Imdadun Rahmat dalam buku tersebut mensinyalir PKS yang merupakan kepanjangan tangan dari Partai Masyumi dan banyak terwarnai oleh ideologi perjuangan Ikhwanul Muslimin sebuah organisasi keagamaan yang didirikan Hasan Al Bana di Mesir dan kemudian berkembang luas ke berbagai negara memiliki *hidden* agenda, yakni mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Penulis berpendapat demikian setelah mengamati dan meneliti berbagai agenda dakwah PKS, seperti aktivitas PKS dalam upaya menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan pelbagai atributnya.

Menurut penulis, upaya PKS tersebut berpotensi melahirkan konflik dengan parpol-parpol lain yang berhaluan nasionalis. Selain itu, syariat Islam tidak mungkin bisa berdiri di Indonesia, karena Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai adat-istiadat, pola pikir, dan kepercayaan (agama) masyarakat. Selain membicarakan ideologi politik PKS, penulis juga membicarakan ideologi keagamaan PKS. Secara umum, ideologi keagamaan PKS adalah Islam modernis yang dikatakan penulis memiliki afiliasi dengan gerakan Wahabi—sebuah gerakan keagamaan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabia. Ciri utama gerakan Wahabi ini adalah upaya menentang keras segala bentuk peribadatan Islam yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad. Sebenarnya, ideologi gerakan Wahabi ini telah berkembang luas di Indonesia sejak awal abad 19, ditandai dengan lahirnya organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi keagamaan yang populer dengan penentangannya terhadap hal-hal yang berbau *tabayul*, *bid'ah*, dan *keburafat* (TBC). Meskipun demikian secara tersirat penulis mengatakan bahwa gerakan dakwah PKS ini lebih berbahaya dari gerakan dakwah

Muhammadiyah, karena sesungguhnya ideologi keagamaan PKS lebih memiliki keterkaitan yang erat dengan ideologi Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi keagamaan yang kontroversial. Kedua tokoh penting Ikhwanul Muslimin, yaitu Hasan Al Bana dan Sayyid Quthb, tewas dibunuh karena gerakan dakwahnya yang dianggap subversif dan mengancam keutuhan negara Mesir. Organisasi ini memang terjun ke politik praktis. Organisasi ini kerap mengkritik hebat kebijakan pemerintah yang mereka anggap bertentangan dengan aturan Islam. Organisasi ini juga dituduh ikut serta dalam upaya penggulingan pemerintahan Mesir dengan cara melakukan penculikan tokoh-tokoh Mesir, pengeboman, dan penggalangan massa untuk melawan pemerintah. Akibatnya, organisasi ini ditekan habis-habisan oleh pemerintah Mesir, bahkan tokoh-tokohnya ditangkap dan dihukum mati.

## **2. Dilematis antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatis**

Tidak bisa dipungkiri, jika hari-hari ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kian mengalami problema politik yang sangat dilematis. Sejak ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaq menjadi tersangka kasus suap peningkatan kuota sapi impor oleh KPK telah menyebabkan penurunan tersendiri bagi elektoral partai. *Thesis* tentang paradigma partai politik

dakwah pun mulai dipertanyakan, apakah benar partai politik dakwah bisa menjadi solusi dalam memperbaiki umat didalam sistem demokrasi seperti saat ini?

Berawal dari pertanyaan itulah, akhirnya kita harus mengkritisi permasalahan demokrasi yang telah menumpulkan potensi politik dakwah itu sendiri didalam sistem kepartaian hari ini. Tragedi yang telah menimpa PKS saat ini seakan menjadi penanda dua indikasi tertentu, yaitu; 1) rapuhnya perjuangan politik dakwah dalam memperbaiki umat melalui partai politik, 2) intensitas pertarungan politik praktis yang mengedepankan kepentingan partai lebih dominan ketimbang memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sehingga menyebabkan pertarungan kalah-menang antar partai dalam memenangkan Pemilu lebih dikedepankan dan mengesampingkan kemaslahatan itu sendiri. Dari indikasi inilah maka kita menilai bahwa kepemilikan perangkat partai seperti media yang bersifat konvensional digunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Hal ini terjadi karena aparatur negara masih merupakan satu-satunya sumber terpenting bagi munculnya para politisi, terutama kepala pemerintahan ditingkat pusat, daerah maupun di dalam bidang legislatif yang berorientasi pada pengakumulasian kapital dan privatisasi sektor untuk keuntungan pribadi. Fenomena baron perampok (*robber barons*) yang melakukan jual-beli suara dan rekayasa mesin politik pun kian menyeruak di Indonesia, regularisasi kebijakan di Indonesia masih bersifat “jual-beli di pasar gelap” yang didalamnya memberikan ruang tawar menawar transaksi, negosiasi, kompromi, dan konsensus yang dilakukan secara rahasia, tak nampak dan illegal akibat perselingkuhan antara penguasa-pengusaha dalam ‘pembuatan kebijakan’ yang mampu memengaruhi birokrasi dan aparat hukum. Prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik hanyalah rekayasa belaka. Pada dasarnya, keputusan tersebut sudah dikompromikan diruang tertutup yang tidak pernah transparan.

Fenomena demokrasi inilah yang telah menyebabkan PKS sulit memenangkan pertarungan melawan dominasi partai politik yang berorientasi pada privatisasi sektor yang dapat mengakumulasikan keuntungan finansial. Disamping itu, PKS juga tidak bisa membangun kolektifitas politik dakwah bersama ‘Parpol Islam’ lainnya dalam upaya mengislah misasikan pemerintahan, yang ada justru pertarungan

elektabilitas dengan parpol Islam lainnya dalam memperebutkan suara dari masyarakat muslim itu sendiri. Fenomena partai terbuka yang kian digemakan PKS pun tak mampu merubah citra identitas awal mereka sebagai partai dakwah itu sendiri.

Pada dasarnya tragedi yang menimpa LHI tidaklah terlalu signifikan menghancurkan sistem penjagaan kaderisasi partai. Kader masih terlihat cukup solid meskipun tengah ditimpa permasalahan yang sangat berarti. Dalam hal ini, harus diakui memang PKS cukup diuntungkan dengan sistem *jama'ah* yang mengedepankan kepercayaan kepada pemimpin *jama'ah* yang sekaligus pemimpin partai—dalam menentukan ber bagai macam kebijakan bagi setiap kader meskipun diantara mereka tidak tahu maksud dan tujuan yang melandasi kebijakan tersebut. Sikap inilah yang selama ini terus dipertahankan hingga ia telah mengakar kuat dalam aktivitas *jama'ah*.

Namun di lain kesempatan, justru kondisi tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan. Arif Munandar dalam disertasinya pun mengakui, sebagian kalangan di PKS ”menggunakan” kedua doktrin tersebut untuk melakukan langkah-langkah pragmatis dengan argumentasi akomodasi politik demi kemaslahatan dakwah, walaupun kelompok lain menilainya absurd dan melenceng dari jati diri partai. Selai itu, meminjam istilah Benedict Anderson tentang *state-qua-state*, maka kita akan menilai bahwa kondisi *jama'ah tarbiyah* hari ini mengalami *jama'ah-qua-jama'ah*, yang melihat bahwa kekuatan-kekuatan kader sebagai determinan sangat minor dalam pembelajaran pengambilan keputusan, karena sifat “sakralitas ketergantungan” kader terhadap elite *jama'ah*, seakan telah melumpuhkan pengembangan potensi kader untuk terlibat aktif dan mempelajari lebih jauh tentang pengambilan sebuah keputusan yang bersifat strategis.<sup>10</sup>

Hal ini telah mengakibatkan demografi intelegensia *jama'ah tarbiyah* saat ini bagaikan struktur piramida. Ditingkat elite yang hanya segelintir pada bagian atas mengalami penajaman secara intelektual dan semakin terbukanya akses akumulasi kapital, namun terjadi pengeroposan intelegensia ditingkat kader yang sangat determinan. Disaat yang seperti inilah, *jama'ah* akan mengalami pengeroposan regenerasi kualitas elite dimasa mendatang, dan semakin bergantung pada elite saat ini. Mengambil

---

<sup>10</sup>Arief Munandar, *Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Sosiologi, 2011), hlm. 6.

konsepsi Foucauldian tentang genealogi yang berusaha mengidentifikasi hal-hal yang menyempal (*accidents*), mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang kecil (*the minute deviations*)’.

kondisi *Jama'ah* mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika memasuki pasca-reformasi terjadi reorientasi gerakan yang sangat berbeda. Pada fase ini gagasan terhadap ideologi Tarbiyah dapat terseleksi, mengalami proses deviasi atau menjelma menjadi sebuah praktik politik yang berbeda dengan ide awalnya, yang mana hal itu sangat ditentukan oleh pertemuan atau perselisihan kepentingan dari aktor (elite partai) yang mengusungnya dengan koalisi sosial yang mereka bangun. Sehingga, dalam pemahaman akan kontestasi diskursus Ideologi Tarbiyah saat ini tidak melupakan bagaimana bisa kepentingan ekonomi-politik mempengaruhi praksis ideologi yang bekerja dalam kontestasi politik tersebut, serta kendala konkret apa yang muncul dari implementasi gagasan dalam realitas politik sangat mudah *disitir* oleh sebagian aktor untuk merekonstruksi wacana baru bagi setiap kader demi penyelamatan aktivitas politik elite partai itu sendiri. Hal ini sangat jauh berbeda ketika *jama'ah Tarbiyah* belum memasuki ranah politik praktis ketika aktivitas dakwah tidak disamakan dengan orientasi elektabilitas.

### C. Partai Keadilan Sejahtera Antara Elitis vs Populis

Sejak awal berkibrah, Ustadz Hilmi telah menegaskan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Jemaah Tarbiyah harus berlangsung *by design*, tanpa mengabaikan perubahan-perubahan kondisi eksternal. Dengan kata lain, dakwah tidak boleh berlangsung sekedar sebagai respon terhadap stimulus-stimulus tertentu. Apapun yang terjadi, dakwah harus berjalan pada *track*-nya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Bagaimana tahapan-tahapan dakwah Jemaah Tarbiyah tersebut dirancang dapat ditelusuri dari pemikiran salah satu sumber inspirasinya yang utama, Hasan al-Banna:

*"Pertama-tama, kita menginginkan seorang yang muslim dalam pola pikir dan akidahnya, dalam moralitas dan perasaannya, serta dalam amal dan perilakunya. Setelah itu, kami menginginkan terbangunnya rumah tangga yang Islami. Sesudah itu, kita menginginkan bangsa yang muslim dalam semua aspek di atas. Setelah itu, kita menginginkan sebuah pemerintahan Islam yang bisa memimpin bangsa ini menuju masjid. Setelah itu, kita menginginkan bergabungnya bersama kita setiap jengkal dari negeri-negeri Islam. Setelah itu kita menginginkan agar panji Allah SWT., kembali berkibar tinggi di seluruh*

*wilayah. Setelah itu dan bersamaan dengannya, kita bermaksud mendeklarasikan dakwah kita kepada seluruh alam, menyampaikannya kepada sekalian manusia, memenuhi seantero bumi dengan ajarannya.”*

Jika dicermati kutipan di atas, setidaknya terlihat dua prinsip penting dalam metodologi dakwah yang digagas Al-Banna. Pertama, *bottom-up*, dimulai dari unit terkecil, dan berlanjut ke satuan-satuan yang lebih besar, dari individu, keluarga, bangsa atau masyarakat, pemerintahan, pembebasan negeri-negeri muslim, dan seterusnya. Kedua, pendekatan yang bersifat kultural, berupa perubahan paradigma dan pola pikir, termasuk di dalamnya keyakinan, perasaan, dan moralitas, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk amal dan perilaku, senantiasa mendahului pendekatan struktural, berupa upaya mengubah institusi-institusiyang ada, termasuk pemerintahan.<sup>11</sup>

Jemaah Tarbiyah mengadopsi tahapan-tahapan dakwah Ikhwan al-Muslimin tersebut. Setelah Jemaah Tarbiyah didirikan tahun 70-an akhir atau 80-an awal dan memfokuskan diri pada *mihwar tanzhimi*, memusatkan perhatian pada islamisasi pribadi-pribadi dan pembentukan keluarga-keluarga muslim, pada tahun 1988 Ustadz Hilmi di hadapan para kader mendeklarasikan bahwa Jemaah Tarbiyah memasuki *mihwar sya'bi*, yaitu orbit atau tahapan pembentukan masyarakat yang islami. Sebagai implementasinya, para kader didorong untuk menjalin interaksi seluas-luasnya, mulai dari berpartisipasi dalam rapat RT, arisan di lingkungan, dan lain-lain, hingga mendirikan berbagai *muasasah* untuk mewadahi berbagai kiprah kemasyarakatan para kader Jemaah Tarbiyah. Tercatat menjamurnya berbagai lembaga sosial-kemasyarakatan milik para kader di akhir 80-an dan di era 90-an, seperti Yayasan Ibu Harapan, Yayasan Ibu Bahagia, Taman Quran Rabbi Radhiyya (Taman Kanak-Kanak Al-Quran pertama), Nurul Fikri (bimbingan belajar, kemudian mengembangkan pula kursus-kursus, sekolah formal, klinik kesehatan, beasiswa kepemimpinan

---

<sup>11</sup>Terkait dengan hal ini, dalam beberapa kesempatan mengisi forum *halaqah*, seorang ustadz menegaskan, Nabi Muhammad saw telah mencontohkan bahwa kemenangan dakwah senantiasa harus mendahului kemenangan politik. Misalnya, keberhasilan Nabi Muhammad saw dan parasahabatnya hijrah ke Madinah dan kemudian mendirikan Negara Madinah didahului oleh keberhasilan misi dakwah yang dikirimkannya ke kota tersebut jauh sebelumnya, sehingga menghasilkan dukungan yang sangat kuat dari warga Madinah yang disebut kaum *Anshar* (penolong) pada saat kaum *Muhajirin* berhijrah ke sana.

untuk mahasiswa, dan lain-lain), *Khairu Ummah* (dakwah tabligh), dan masih banyak lagi.

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh para kader Jemaah Tarbiyah adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dengan waktu sekolah yang lebih panjang, *full day school*. Sebelum ada konsep SDIT, para orangtua yang *concern* pada pendidikan keagamaan biasanya menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah umum pada pagi hingga siang hari, dan kemudian melengkapinya dengan madrasah di sore hari. Para pengagas SDIT memandang bahwa hal ini tidak efektif, karena murid dididik dengan kurikulum yang tidak utuh. Di samping itu, para aktifis dakwah memiliki kesibukan yang relatif tinggi, sehingga jika anak-anak mereka hanya bersekolah setengah hari seperti di sekolah-sekolah umum, sisa waktunya menjadi tidak produktif, karena sangat mungkin diisi dengan menonton TV atau aktifitas lainnya dengan ditemani oleh pembantu rumah tangga. Seorang anggota Dewan dari PKS mengatakan, ” *Subhanallah* ya, SDIT di seluruh Indonesia itu menolak murid ya sampai sekarang.” Setelah jenjang SD, konsep sekolah Islam terpadu juga diterapkan di jenjang-jenjang yang lebih tinggi, sehingga lahirlah SMP Islam Terpadu (SMPIT) dan SMA Islam Terpadu (SMAIT). Selanjutnya sekolah-sekolah Islam terpadu tersebut tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), yang memiliki ratusan anggota di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rencana awal yang dicetuskan tahun 1997, para aktifis Jemaah Tarbiyah baru akan memasuki *mihwar mu’asasi*, terjun ke politik dengan fokus pada *islahul bukuamah* (perbaikan pemerintahan) pada tahun 2010. Karena itu rencana tersebut dinamakan “Visi 2010”. Namun kemudian terjadilah Reformasi 1998 yang melengserkan Soeharto dan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, dan membuka peluang mendirikan partai politik dengan azas yang beragam, termasuk azas Islam.

Pada saat itu setidaknya terdapat tiga alternatif bentuk struktur yang dipertimbangkan, yaitu ormas, ormas yang memiliki wahana berupa partai politik, dan partai politik. Pertimbangan jumlah SDM yang terbatas membuat pilihan membuat ormas yang memiliki sayap politik menjadi tidak *feasible* untuk dilakukan. Sementara itu, pilihan menjadi ormas saja juga dipandang tidak memadai untuk memanfaatkan momentum yang menyediakan peluang untuk mereformasi kondisi politik Indonesia.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, mendirikan partai politik menjadi pilihan yang paling masuk akal.<sup>12</sup>

Di kalangan para kader senior Jemaah Tarbiyah terjadi perbedaan pandangan tentang apakah saat itu *timing* yang tepat untuk mendirikan partai. Mereka yang pro berargumentasi bahwa momentum yang ada harus dimanfaatkan. Sementara mereka yang kontra merasa belum saatnya Jemaah Tarbiyah terjun ke politik, karena sejumlah prasyarat yang dibutuhkan untuk itu belum dimiliki. Seorang elit PKS yang memegang jabatan yang sangat strategis sejak jaman PK hingga saat ini, termasuk kelompok yang tidak setuju mendirikan partai pada tahun 1998. Perdebatan yang terjadi saat itu bukan tentang pilihan berpartai atau tidak, karena hal itu sudah menjadi hal yang aksiomatik dalam doktrin dakwah Jemaah Tarbiyah, namun antara saat itu atau nanti. Lebih lanjut elit PKS tersebut menguraikan, alasannya tidak setuju partai didirikan saat itu karena Jemaah Tarbiyah belum memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk berpartai, yaitu pengalaman politik, ahli politik, sumber daya, dan tokoh politik yang dapat ditampilkan di publik. Sebaliknya, ada kader lain yang sangat setuju dengan gagasan berpartai, karena dipandang akan menyediakan ruang yang lebih luas bagi para kader Jemaah Tarbiyah untuk menyuarakan dakwahnya dan menggerakkan perubahan masyarakat dan bangsa.

Terdapat dinamika yang cukup hangat sebelum Jemaah Tarbiyah sampai pada keputusan berpartai. Perdebatan di *syura* berlangsung selama enam bulan dan tak kunjung membuahkan keputusan, sehingga kemudian dilakukan mekanisme “referendum internal” yang melibatkan para kader, dengan hasil 68% setuju Jemaah Tarbiyah menjadi partai, dan sisanya, 32% tidak setuju. Keputusan mendirikan partai politik diambil dengan mempertimbangkan dua faktor, yaitu kesiapan masyarakat untuk menerima kehadiran partai Islam dan memanfaatkan momentum perubahan politik yang terjadi. Walaupun demikian, setelah keputusan mendirikan partai politik diambil, kelompok yang semula tidak sependapat

---

<sup>12</sup>Dalam diskusi informal di akhir bulan April 2011, seorang informan menyampaikan bahwa beberapa waktu belakangan ini sudah mulai dipertimbangkan gagasan untuk memisahkan *tanzhim* Jemaah Tarbiyah dengan *tanzhim* partai politik, karena jumlah kader yang dirasakan sudah cukup memadai, dan adanya manuver-manuver partai yang tidak menguntungkan bagi jemaah. Yang menarik, informan tersebut menuturkan bahwa jika keputusan tersebut diambil, besar kemungkinan AM akan memilih mundur dari partai dan berkonsentrasi di jemaah, karena ia menyadari bahwa posisinya di partai sudah tidak menguntungkan lagi.

pun memberikan komitmennya terhadap keputusan tersebut. Dengan diambilnya keputusan mendirikan Partai Keadilan tahun 1998, artinya *mihwar muasasi* mengalami percepatan 12 tahun, dari semula dicanangkan akan dimasuki pada tahun 2010.

Setelah diputuskan menjadi partai dan berjalan hingga saat ini, bukan berarti sudah tidak ada perdebatan di internal PKS tentang sikap politik yang harus diambil. Ada sementara kalangan yang mendorong PKS untuk bersikap lebih militan dan heroik dengan keluar dari koalisi partai-partai Pemerintah dan menjadi oposisi. Padahal pilihan menjadi oposisi belum tentu lebih baik untuk dakwah, karena terdapat peluang berbagai cap negatif, seperti ekstrem, fundamentalis, dan sebagainya akan disematkan kepada PKS. Seorang anggota Majelis Syura menuturkan bahwa di Majelis Syura sempat ada arus pemikiran yang menghendaki PKS memutuskan hubungan koalisi karena sikap-sikap dan langkah-langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dipandang sering mengabaikan PKS. Ustadz Hilmi mengapresiasi pendapat tersebut, namun beliau memberikan beberapa pertimbangan. Pertama, memutuskan koalisi dengan SBY dan Partai Demokrat di tingkat nasional akan menimbulkan dampak yang sangat kompleks, karena di berbagai daerah, di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, PKS banyak terlibat dalam koalisi dengan PD dalam mengusung ataupun mendukung Kepala Daerah.

Kedua, kemampuan para aktifis Jemaah Tarbiyah di Indonesia untuk menjalin dan memelihara koalisi dengan Pemerintah dalam situasi yang begitu kompleks menjadi inspirasi dan referensi bagi para aktifis Islam di berbagai negara yang sebelumnya cenderung beroposisi, bahkan berkonflik dengan pemerintah. Jika baru berjalan beberapa saat ternyata koalisi tersebut tidak langgeng, PKS tidak lagi dapat menjadi contoh yang baik bagi para aktifis Islam di negara-negara lain.

#### **D. Partai Keadilan Sejahtera Antara Dogmatis vs Pragmatis**

Kondisi internal PKS yang sangat dinamis terbentuk karena PKS mengadopsi khasanah pemikiran Islam yang spektrumnya sangat luas dan mengalami perkembangan yang masif selama berabad-abad. Latar belakang lahirnya Jemaah Tarbiyah atau PKS sesungguhnya dimulai pada abad ke-20, dimana terjadi pembalikan arah sejarah yang ingin mengulang ekspansi dan kejayaan Islam selama sepuluh abad, abad ke-7 hingga abad ke-17. Dalam hal ini umat Islam di Indonesia, termasuk PKS, telah

menjadi korban alur pikir dan politik linguistik Barat, antara lain dalam kategorisasi *islamist*, *political Islam*, *islamic political parties*, maupun dalam tipologi ala Geertz, santri, priyayi, abangan. Dalam kategorisasi tersebut, PKS dipaksa masuk ke dalam kategori "sant ri" dengan segala cirinya, seperti *rural oriented*, tidak moderen, tampil bersarung, dan hanya saleh secara pribadi.

Implikasinya, ketika PKS tampil dengan atribut-atribut "abangan", seperti berjas, menyelenggarakan acara-acara di hotel mewah dan sebagainya, muncul penilaian seolah PKS telah berubah dan meninggalkan jatidirinya. Kekagetan dan ketidanyamanan dari sebagian kader atas penyelenggaraan Munas 2009 di Bali dan Munas 2010 di Hotel Ritz Carlton The Pacific Place Jakarta merupakan contohnya.

Perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi partai mau tidak mau membawa konsekuensi perubahan paradigma dakwah yang dijadikan rujukan oleh para kadernya, karena dakwah memasuki *mihwar* baru, yaitu *mihwar muasasi*. Sangat disadari bahwa perubahan tersebut tidak mudah, karena terdapat rintangan yang jauh lebih kompleks ketimbang sebelumnya, ketika dakwah mungkin dibatasi oleh tembok-tembok mesjid. Dalam konteks ini, terdapat keharusan mengubah strategi gerakan. Tuntutan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Keterbatasan prasarana dan sarana yang dihadapi oleh Jemaah Tarbiyah sebelum menjadi partai merupakan tantangan masa itu, sebaliknya, kebebasan dan keterbukaan pasca reformasi, termasuk di dalamnya peluang-peluang para kader untuk tampil di publik, juga merupakan tantangan yang khas untuk masa sekarang.

Setelah menjadi partai maka para aktifis Jemaah Tarbiyah harus lebih toleran terhadap berbagai kelompok masyarakat yang beragam, dan berupaya mencari titik temu dengan mereka. Bahkan perkembangan pemikiran terbaru di Dewan Syariah Pusat sudah memungkinkan berlakunya lokalitas yang tidak bersifat nasional, melainkan wilayah atau daerah. Dengan demikian para kader PKS di berbagai wilayah atau daerah dimungkinkan untuk mengikuti pendapat yang sudah diterima secara umum di wilayah atau daerah tersebut, walaupun hal tersebut berbeda dengan keputusan PKS di tingkat nasional.

Sebelum dan pada saat-saat awal berpartai, para kader cenderung berpikir sangat sempit ketika berinteraksi dengan orang lain, dimana konteksnya selalu mempertimbangkan sejauh mana kemungkinan orang

tersebut bisa direkrut menjadi kader. Sehingga kriteria-kriteria yang sangat internal, yang menjadi kriteria kader, sering digunakan untuk menentukan apakah orang-orang tersebut layak untuk diajak berinteraksi. Kemudian disadari bahwa dalam konteks demokrasi dengan suara terbanyak cara berpikir tersebut tidak efektif, karena membuat basis pemilih PKS menjadi relatif terbatas. Perubahan tersebut tersimpul dalam sikap PKS yang mendorong para kadernya untuk menjadi pemimpin masyarakat. Untuk itu, perubahan mendasar yang pertama kali harus dilakukan adalah dalam cara melihat siapa yang dipimpin. Para kader PKS tidak bisa lagi melihat bahwa yang harus mereka pimpin sebatas komunitas mereka sendiri, melainkan komunitas mereka ditambah sekian banyak komunitas lain yang beragam. Sebagai pemimpin masyarakat para kader PKS dituntut untuk memahami kebutuhan orang lain serta menghargai eksistensi, kebiasaan, dan keinginan mereka, karena pemimpin masyarakat dinilai berkinerja baik jika mampu membawa aspirasi, menaungi, memberikan rasa aman, dan mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya.

Oleh karena itu, disadari perlunya perubahan yang sangat mendasar dalam pembinaan dan pengelolaan kader, di mana pendekatan yang direktif yang selama ini digunakan harus ditinggalkan, digantikan dengan pola hubungan yang lebih konsultatif, kemudian partisipatif, dan akhirnya delegatif. Dalam pola hubungan konsultatif kader datang kepada pemimpinnya untuk berkonsultasi sebelum dia bergerak. Dalam pola hubungan partisipatif kader bersama-sama dengan pemimpinnya bergerak langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam pola hubungan delegatif, *qiyadah* memberikan ruang kepada kadernya untuk bergerak langsung memimpin masyarakat. Secara umum kader-kader PKS di *grass root* masih terkungkung oleh pola-pola hubungan yang direktif, dimana mereka masih sangat mengharapkan instruksi dari *qiyadah*-nya, walaupun pola-pola partisipatif sudah mulai terlihat. Salah satu indikatornya, di milis atau media sosial lainnya, terlihat bahwa para kader sudah mulai kritis terhadap pemimpin mereka. Oleh karena itu, para *qiyadah* juga harus belajar dan berubah. Sedangkan kader-kader PKS yang memegang jabatan publik, khususnya mereka yang duduk di DPR, sudah relatif mampu menerapkan pola hubungan yang konsultatif, dan sebagiannya sudah mulai bergerak ke arah partisipatif, walaupun sebagian masih terkesan harus dipaksa untuk itu. Namun kemampuan para kader untuk menerapkan pola hubungan yang delegatif masih relatif sangat kecil,

bahkan ditingkat anggota Majelis Syura yang merupakan jenjang kader yang tertinggi.

Secara historis, di masa lalu Jemaah Tarbiyah memulai kiprahnya ketika rejim Orde Baru yang otoriter sedang berkuasa, di mana negara menginfiltrasi dan menginternvensi seluruh partai politik, ormas, organisasi keagamaan, dan institusi apapun secara sempurna. Dapat dipahami jika reaksi terhadap situasi itu adalah bertahan dan bersembunyi. Namun situasi otoritarianisme tersebut sudah berakhir. Saat ini bahkan seorang Presiden pun tak kuasa mencegah orang berdemo dengan membawa kerbau yang diasosiasikan dengan dirinya, atau menginjak-injak fotonya. Artinya, para kader Jemaah Tarbiyah tidak bisa lagi mempertahankan citra diri sebagai objek penguasa yang otoriter. Dengan berubahnya Jemaah Tarbiyah dari sebuah “gera kan bawah tanah” menjadi partai, sebagian besar paradig ma yang valid dijadikan rujukan ketika di *mibwar tanzhimi* sudah tidak relevan lagi, atau setidaknya perlu dikaji ulang, karena perubahan fase dakwah tersebut juga menuntut peningkatan kematangan dan kedewasaan kader. Satu hal yang disoroti adalah pandangan keagamaan yang cenderung rigid dan sikap konfrontatif terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki ideologi yang berbeda.

Di tahap *tanzhimi*, hal-hal tersebut relevan karena konteks waktu itu adalah membangun identitas dan militansi kader. Di masa itu istilah *thagut* sangat lazim digunakan sebagai label untuk pemerintah atau kekuatan-kekuatan lain yang dipandang tidak berpihak kepada Islam dan dakwah. Sebagai contoh, sekitar tahun 1992 Nurcholis Madjid almarhum (Cak Nur) berhadap-hadapan dengan DRS, seorang Doktor Tafsir Hadits dan saat itu tokoh yang cukup senior di Jemaah Tarbiyah, dalam sebuah perdebatan yang sangat panas. Dalam forum itu gagasan-gagasan Cak Nur yang ketika itu dinilai liberal dan sekular, didebat habis-habisan, bahkan dihakimi dan dihujat. Seorang murid Ustadz Hilmi menegaskan bahwa sikap keras para kader Jemaah Tarbiyah tersebut bukanlah ajaran Ustadz Hilmi, bukan ajaran dan *manhaj* dakwah ini, walaupun Ustadz Hilmi memberikan keleluasaan kepada murid-muridnya untuk berkiprah dan bereksperimen di lapangan, dan kemudian memetik pelajaran dari hasil eksperimen tersebut.

Para kader Jemaah Tarbiyah lalu mendirikan PK yang kemudian menjadi PKS. Di samping itu para kader pun harus menerima realita, misalnya, kekuatan lobi Yahudi di Amerika dan di seluruh dunia yang

belum bisa ditumbangkan oleh kaum muslimin, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih cerdas daripada sekedar konfrontasi langsung. Di sisi lain Cak Nur pun mulai bergerak mendekat. Cak Nur yang sebelumnya terkenal dengan jargonnya “Islam yes, Partai Islam no” kemudian menjadi sangat mengapresiasi PKS. Ada sebuah kenangan yang melekat pada sebagian kader PKS bagaimana Cak Nur menghadiri *milad* PKS tahun 2004 di Stadion Utama Senayan, dimana ia duduk diapit oleh Ustadz Hilmi Aminuddin dan Hidayat Nur Wahid.

### E. Penutup

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap tulisan di atas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa:

*Pertama*, aparatur negara masih merupakan satu-satunya sumber terpenting bagi munculnya para politisi, terutama kepala pemerintahan daerah ditingkat pusat maupun dalam bidang legislatif yang berorientasi pada pengakumulasian kapital dan privatisasi sektor untuk keuntungan pribadi. Regularisasi kebijakan di Indonesia masih bersifat “jual-beli di pasar gelap”. Prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik hanyalah rekayasa belaka. Berdasarkan fenomena demokrasi tersebut menyebabkan PKS sulit memenangkan pertarungan melawan dominasi partai politik. PKS juga tidak bisa membangun kolektifitas politik dakwah bersama ‘Parpol Islam’ lainnya dalam upaya mengislamisasi pemerintahan. Fenomena partai terbuka yang kian digemakan PKS pun tak mampu merubah citra identitas awal mereka sebagai partai dakwah itu sendiri. Tragedi yang menimpa LHI tidak terlalu signifikan menghancurkan sistem penjagaan kaderisasi partai karena masih terlihat cukup solid. PKS cukup diuntungkan dengan sistem *jama’ab* yang mengedepankan kepercayaan kepada pemimpin dalam menentukan berbagai macam kebijakan bagi setiap kader. Sikap ini terus dipertahankan hingga mengakar kuat dalam aktivitas *jama’ab*. Namun di lain kesempatan, kondisi tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan.

*Kedua*, kondisi *Jama’ab* mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika memasuki pasca-reformasi. Pada fase ini gagasan terhadap ideologi Tarbiyah dapat terseleksi, mengalami proses deviasi atau menjelma menjadi sebuah praktik politik yang berbeda dengan ide awalnya. Hal ini sangat jauh berbeda ketika *Jama’ab Tarbiyah* belum memasuki ranah politik praktis ketika aktivitas dakwah tidak disamakan dengan orientasi

elektabilitas. Ada dua hal yang mendasari perihal tersebut, yaitu; *Pertama*, secara tidak sadar, sistem *jama'ah Tarbiyah* memberikan peluang untuk menciptakan ideologi Tarbiyah sebagai satu-satunya asas tunggal yang telah menciptakan 'sakralisasi struktur kelas' tersendiri. Akhirnya kader terjebak pada kesadaran teknokratis yang telah mengondisikan ideologi untuk mempertahankan 'struktur' yang menekankan pada kelestarian sistem (*system maintenance*) yang dibuat dan dirubah oleh elite itu sendiri. Sistem ini juga memberikan peluang para elite untuk memberikan imbalan-imbalan sosial bagi mereka yang menjamin kesetiaan *massa* pada sistem tersebut. *Kedua*, menegaskan identitas kelompok, sistem kaderisasi PKS memagari kadernya dengan *group* dan *grid*. Sikap defensif dan resisten terhadap orang yang mengkritisi *jama'ah* dan pandangan yang bersifat *inward looking* bertujuan untuk menjaga kemurnian kelompok dari "penetrasi dunia luar" yang dianggap akan mengganggu stabilitas *jama'ah*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Munandar, *Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Disertasi, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Sosiologi, 2011.
- Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, ed., *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi Dan Program 2004-2009*, Jakarta: Kompas, 2004.
- Cahyadi Takariawan, *Bukan Di Negeri Dongeng Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan*, Jakarta: Syaamil, 2003.
- Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2007.
- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati "Dari dilema ke Kompromi"*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008

Partai Keadilan Sejahtera, Platform Kebijakan Pembangunan Falsafah Dasar Perjuangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Jakarta: 2008.

R. William Liddle, *Partisipasi Dan Partai Politik*. Penerjemah Tim Pustaka Utama Grafiti Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010.

“Urgensi Perbedaan Ideologi Dalam Partai Politik”, (<http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/16/urgensi-perbedaan-ideologi-dalam-partai-politik/>). Akses 28 September 2013.